

**EVALUASI KINERJA
TRIWULAN IV
TAHUN 2020**

<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/evaluasi-kinerja-2020/>

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Jalan Danau Luar No. 01 - Telp. (0567) 21359 - Putussibau - Kode Pos 78711
Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id - Email: satpolpp@kapuashulukab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Danau Luar No. 01 - Telp. (0567) 21359 - Putussibau - Kode Pos 78711
Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id - Email: satpolpp@kapuashulukab.go.id

NOTULEN RAPAT EVALUASI KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2020
PENETAPAN PERENCANAAN 2022-2026 DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Hari ini Selasa Tanggal 19 Bulan Januari Tahun 2021 Pukul 13:00 WIB bertempat di Ruang Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu telah dilaksanakan Rapat dengan Agenda:

1. Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2020;
2. Penetapan Target Kinerja 2021;
3. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 2021;
4. Penetapan Ranwal Renstra 2021-2026;
5. Penyusunan RKA 2022;
6. Manajemen Resiko 2021;
7. Penyusunan KAK 2021;
8. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan dan Triwulanan.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan 10 peserta anggota rapat yang terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil, Kepala Bidang Penegakan dan Operasi, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, Kepala Seksi Pengendalian Operasi, Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat, Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Linmas/ Plt. Kasubag Program, dan Staf Sub Bagian Program sebagai notulen. (Daftar Hadir terlampir).

Adapun hasil rapat dan pembahasan diuraikan sebagai berikut:

1. Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2020

a Capaian Kinerja Tahun 2020

Berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja pada setiap bidang, seksi dan sub bagian yang tertuang dalam Monitoring Kinerja Triwulan I s/d IV (Monitoring Rencana Aksi Atas Kinerja) Capaian Kinerja diuraikan pada tabel berikut:

Kode		Uraian	Indikator	Targ et	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
P	K							%
1	2	3	4	5	6	7	8	11
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								98,62
IKU 1		Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Predikat SAKIP	BB	Nilai	-	-	98,52
01		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	95%	%	98%	103,66%	98,48
01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Perangko yang dibeli	1.050	Lbr	970	92,38%	100,00
01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Telepon, Air dan Listrik	12	Bln	12	100,00%	96,75
			Pembayaran Langganan TV Kabel	5	Jar	5	100,00%	
01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajaknya	6	Unit	8	133,33%	79,88
01	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	220	OB	227	103,18%	98,76
01	009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	27	Unit	36	133,33%	100,00
01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli	74	Jenis	74	100,00%	100,00

01	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dokumen yang dicetak	4	Dok.	4	100,00%	100,00
			Dokumen yang digandakan	10	Dok.	10	100,00%	
01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat-Alat Listrik dan Lampu Penerangan Kantor	11	Jenis	11	100,00%	100,00
01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Jumlah Langganan Koran	4	Editor	4	100,00%	100,00
01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang yang Disediakan Makanan dan Minumannya	88	Orang	88	100,00%	100,00
01	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	5	Keg.	5	95,00%	99,97
01	019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan kunjungan kerja	15	Keg.	24	158,33%	100,00
01	031	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	3	Dok.	3	100,00%	100,00
01	061	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/ Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Aparatur yang Menerima Tunjangan Khusus	2.338	OB	2.315	99,02%	97,90
01	062	Pembuatan dan Pengembangan Website SKPD	Jumlah Website yang di kelola/dikembangkan	1	Web	1	100,00%	100,00
01	066	Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah Spanduk yang Disediakan	23	Buah	14	60,87%	99,97
02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasaran Aparatur dalam kondisi BAIK	95%	%	98%	103,41%	99,97
02	024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kegiatan Servis Kendaraan	28	Keg.	29	103,57%	99,97
			Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan	50	Jenis	50	100,00%	
			Jumlah BBM	23.600	Liter	20.745	87,90%	
03		Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan keseragaman pakaian dinas beserta kelengkapannya	95%	%	1	105,17%	99,91
03	005	Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga	87	Stel	87	100,00%	99,91
05		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan PNS/ Non PNS yang kompeten	91%	%	70%	76,67%	94,88
05	028	Kesamaptaan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Latihan Bela Diri dan Kesamaptaan	50	Orang	0	0,00%	100,00
05	030	Penilaian Kredit Point Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional	39	Orang	30	76,92%	92,96
05	031	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Peserta Pelatihan Dalmas	50	Orang	51	102,00%	100,00
06		Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95%	%	100%	105,26%	100,00
06	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	1	Dok.	1	100,00%	100,00
06	025	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	2	Dok.	2	100,00%	100,00
06	042	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di SKPD	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	1	Dok.	1	100,00%	100,00

IKU 2	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu		Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	%	100%	100,00%	99,25
			Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100 %	%	100%	100,00%	
16		Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan Pemeriksaan dan Penyidikan Pelanggaran Perda	100 %	%	100%	100,00%	99,05
16	006	Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantrantibmas	Jumlah Kegiatan Pengamanan	21	Keg.	29	138,10%	99,34
16	008	Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA	Jumlah Pelanggaran PERDA yang ditindaklanjuti	100%	Kasus	100%	100,00%	100,00
16	011	Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi Pelanggaran Perda	Jumlah Pelanggaran Perda yang Termonitor dan Terevaluasi	3	Kasus	3	100,00%	100,00
16	013	Pengamanan dan Pengawalan Kunjungan Kerja Pejabat	Jumlah Kegiatan Pengamanan Pengawalan Pejabat Pemda, Provinsi dan Pusat	24	Keg.	53	220,83%	99,97
16	015	Penyusunan Raperda Tibum	Jumlah Raperda Tibum	1	Raperda	1	100,00%	67,59
17		Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rasio Petugas LINMAS	0,97	Linmas/RT	0,95	98,04%	99,73
17	002	Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Satlinmas yang Direkrut	1.075	Orang	1.043	97,02%	99,90
			Jumlah Anggota Satlinmas Aktif	1.624	Orang	1.592	98,03%	
17	006	Bantuan Penanganan Bencana dan Kebakaran	Jumlah kegiatan bantuan penanganan bencana dan kebakaran	10	Keg.	9	90,00%	99,60

b Permasalahan dan Solusi

- Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Permasalahan yaitu. Salah satu kendaraan tidak bisa dibayar pajaknya karena harus mengganti plat. Jika tidak dibayarkan silva akan cukup besar dan akan menjadi bahan evaluasi.Solusi ada 2 kendaraan dinas roda dua yang tidak dibayar pajaknya.
- Penilaian Kredit Point Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja hanya mencapai 76,92%. Permasalahan yaitu. Tingkat Minat Anggota Pol PP untuk mengikuti Tes Jabatan Fungsional tidak ada, Peserta tidak siap untuk mengemban tugas sebagai Jafung. Solusi dan tindak lanjut Membuat surat Penryataan dan Teguran/ pembinaan bahwa seluruh PNS Satpol PP Wajib Jafung
- Pada seksi Peningkatan Kapasitas Personil satpol PP tidak memiliki arsip laporan pelaksanaan kegiatan. Solusi setiap laporan harus menggandakan laporan dan arsip agar ketika diminta laporan tersedia. Laporan wajib disampaikan kepada Kasat dan Kasubag Program.

2. Target Kinerja 2021

Dengan telah disusunnya RKA 2021 maka ditetapkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja pada Tahun 2021 berdasarkan Permendagri 90 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Thn 2020. Target Kinerja yang sudah disepakati harus dapat terealisasi sesuai target dan akan ditandatangani dalam dokumen **Perjanjian Kinerja** yang akan dilaksanakan setelah Rapat ini. Adapun target Kinerja yang telah disepakati bersama adalah sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja	Targ et	Satuan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							9.602.033.270
IKU 1			Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Predikat SAKIP	BB	Nilai	7.822.870.320
01			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Predikat SAKIP	BB	Nilai	7.822.870.320
01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	BB	Nilai	24.486.620
01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	6	Dokume n	5.865.780
01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang dikerjakan	1	Dokume n	1.341.650
01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang dikerjakan	4	Dokume n	4.111.950
01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang dikerjakan	1	Dokume n	1.613.950
01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang dikerjakan	4	Dokume n	4.679.550
01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang dikerjakan	6	Dokume n	1.624.790
01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja	4	Kegiata n	5.248.950
01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	95%	%	6.650.859.960
01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pol PP	12	Bulan	6.427.539.960
				Jumlah Aparatur Pol PP yang menerima Tunjangan Khusus	1.512	OB	
01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	156	OB	223.320.000
01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian	95%	%	44.180.000
01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas (Sepatu PDL Crime)	87	Pasang	44.180.000
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	95%	%	655.321.490
01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat-Alat Listrik dan Lampu Penerangan Kantor	9	Jenis	22.649.000
01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan	5	Unit	39.270.150
01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan	1	Buah	

				Rumah Tangga yang disediakan			9.265.500
01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	86	Orang	195.968.000
01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dokumen yang dicetak/ digandakan	16	Jenis	24.622.840
01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Langganan Koran	4	Editor	5.742.000
01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	31	Kegiatan	316.504.000
01	2.06		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Admin/ Operator/ Sistem Informasi yang dikerjakan	118	OB	41.300.000
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	%	158.805.500
01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Perangko yang dibeli	1.000	Lembar	4.950.000
01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Telepon, Air dan Listrik	12	Bulan	46.980.000
				Pembayaran Tv Kabel dan Internet	12	Bulan	
01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	24	Unit/ Thn	16.560.000
01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli	68	Jenis	90.315.500
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK	90%	%	289.216.750
01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah BBM	13.971	Liter	268.556.750
				Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan dan Service	36	Jenis	
				Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajaknya	8	Unit	
01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Website yang dikelola/ dikembangkan/ dipelihara	1	Website	20.660.000
IKU 2			Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	%	1.779.162.950
				Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	%	
02			Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada/ K3	100%	%	1.779.162.950

02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100 %	%	1.758.413.550
02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kegiatan Pengawasan PKL	1	Kegiatan	1.426.312.300
				Jumlah Kegiatan Pengamanan	22	Kegiatan	
				Jumlah Pegawai Honorer/ Tidak Tetap yang menerima Honorarium	34	Orang	
				Jumlah Kegiatan Pengamanan Pengawasan Pejabat Pemda, Provinsi dan Pusat	12	Kegiatan	
				Jumlah Daerah Rawan Trantibum	23	Kecamatan	
				Jumlah Personil Pengamanan (Pos Penjagaan, Dan Pos, Perwira Pengawas, Pamkat VIP dan PTI)	67	Orang	
				Jumlah Raperda Tibum	1	Raperda	
02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Pelanggaran K3 yang terselesaikan	100 %	%	49.367.800
				Jumlah Pelanggaran K3 keseluruhan/ yang dilaporkan			
02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rasio Petugas LINMAS	0,98	Linmas/ RT	130.040.400
				Persentase Penanganan bencana	50%	%	
				Jumlah Peserta Pembinaan Potensi Linmas Desa	50	Orang	
02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional	40	Orang	144.693.050
				Jumlah Aparatur yang Mengikuti Latihan Bela Diri dan Kesamaptaan	50	Orang	
				Jumlah Peserta Pelatihan Dalmas	50	Orang	
				Jumlah Anggota yang mengikuti Pelatihan Linmas	20	Orang	
02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum	16	Org/ Pkt	8.000.000

02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Perda dan Perkada Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100 %	%	20.749.400
02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Perda yang Termonitor dan Terevaluasi	5	Kasus	20.749.400
							9.602.033.270

Sebelum melaksanakan kegiatan diharapkan membuat Perbub dan SK:

- SK Bupati dan Kasat Pengelola Keuangan;
- SK Bupati Tim Pengawasan PKL
- SK Bupati Penindakan Trantibum
- SK Bupati Pembinaan Potensi Linmas Desa
- SK Bupati Tim Penilai Jafung

3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 2021

Telah disepakati bersama waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021:

No	Kegiatan	Bulan/ Tanggal											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dokumen Perencanaan (Renstra, Ranwal Renja, Renja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, dan Rencana Tindak Pengendalian Resiko)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Penyusunan RKA												
3	Penyusunan RKA Perubahan												
4	Penyusunan DPA												
5	Penyusunan DPA Perubahan												
6	Laporan Realisasi Kinerja & Keuangan												
7	Evaluasi Kinerja												
8	Gaji dan Tunjangan ASN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Tunjangan Khusus												
10	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan												
11	Pengadaan (Sepatu PDL 2 Crime, Mesin Absensi Sidik Jari, Televisi, Laptop, Komputer, Tenda dan Website)												
12	Penyediaan Alat Listrik dan Penerangan Kantor												
13	Penyediaan Makanan dan Minuman												
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
15	Langganan Koran												
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
17	Pembayaran Honor Admin/ Operator/ Sistem Infomasi												
18	Belanja Materai & Perangko												
19	Pembayaran Telpon, Air, Listrik, TV Kabel & Internet												
20	Perbaikan Peralatan Kerja												
21	Penyediaan ATK Rutin												
22	Belanja Penggantian Suku Cadang, Service dan BBM												
23	Pembayaran Pajak STNK Kendaraan												
24	Pengawasan PKL												
25	Pengamanan												
26	Pembayaran Gaji Tenaga Kontrak												
27	PAMWAL												
28	Pembuatan Peta Rawan Trantibum												
29	Pembayaran Honor Pos, Danpos, Perwira Pengawas, PAMKAT, dan PTI												
30	Penyusunan Raperda Tibum												
31	Pendataan Linmas												
32	Penanganan Bencana												

[illegible]

4. Ranwal Renstra 2021-2026

Yang belum menyampaikan Ranwal Renstra sampai dengan saat ini yaitu:

- Seksi PKP Pol PP;
- Sub Bagian Umum dan Aparatur.

Berdasarkan Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 050/05/POL.PP/SET-A/2021 Tanggal 5 Januari 2021 Perihal Penyusunan Renstra 2021-2025, maka ditetapkan **Rancangan Awal Renstra** 2021-2026 Satpol PP Kab. Kapuas Hulu sebagai berikut:

Kode			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Formulasi Perhitungan	Satuan Target	Target Kinerja dan Anggaran							
Prog	Keg	Sub				2022		2023		2024		2025	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
IKU 1			Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Predikat SAKIP	Nilai i	BB	10.084.333.046	BB	10.588.801.619	BB	11.118.518.814	A	11.676.206.602
01			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Predikat SAKIP	Nilai i	BB	10.084.333.046	BB	10.588.801.619	BB	11.118.518.814	A	11.676.206.602
01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Nilai i	BB	25.939.971	BB	27.488.890	BB	29.140.449	A	32.359.318
01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dok.	6	6.159.069	6	6.467.022	6	6.790.374	6	7.469.411
01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang dikerjakan	Dok.	1	1.475.815	1	1.623.397	1	1.785.736	1	2.053.597
01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang dikerjakan	Dok.	4	4.317.548	4	4.533.425	4	4.760.096	4	5.236.106
01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang dikerjakan	Dok.	1	1.775.345	1	1.952.880	1	2.148.167	1	2.470.393
01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang dikerjakan	Dok.	4	4.913.528	4	5.159.204	4	5.417.164	4	5.958.880
01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang dikerjakan	Dok.	6	1.787.269	6	1.965.996	6	2.162.595	6	2.486.985
01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja	Keg.	4	5.511.398	4	5.786.967	4	6.076.316	4	6.683.947
01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	%	95%	7.019.902.958	95%	7.370.898.106	95%	7.739.443.011	95%	8.126.415.162
01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pol PP	Bln	12	6.748.916.958	12	7.086.362.806	12	7.440.680.946	12	7.812.714.994
				Jumlah Aparatur Pol PP yang menerima Tunjangan Khusus	OB	1.512		1.527		1.542		1.558	
01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	OB	156	234.486.000	158	246.210.300	161	258.520.815	165	271.446.856
01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen yang dikerjakan (Kwitansi, BKU, Jurnal Umum, Buku Besar, Rincian Objek, Fungsional, Administratif, Register	Jns Dok.	9	10.000.000	9	10.500.000	9	11.025.000	9	11.576.250

				Penutupan Kas, BAPK)									
01	2.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	Dok.	1	7.500.000	1	7.875.000	1	8.268.750	1	8.682.188
01	2.0 2	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	Dok.	1	5.000.000	1	5.250.000	1	5.512.500	1	5.788.125
01	2.0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	Dok.	4	9.000.000	4	9.450.000	4	9.922.500	4	10.418.625
01	2.0 2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	Dok.	1	5.000.000	1	5.250.000	1	5.512.500	1	5.788.125
01	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah	%	95 %		95%		95%		95%	
01	2.0 3	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang	Dok.	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
01	2.0 3	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
01	2.0 3	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian/ Penafsiran	Dok.	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
01	2.0 3	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD										
01	2.0 3	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
01	2.0 3	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
01	2.0 3	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD										
01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian	%	95 %	1.150.038.750	95%	1.207.540.688	95%	1.267.917.722	95%	1.331.313.608
				Jumlah Data Pegawai yang disediakan	Dok.								
				Jumlah Data Pegawai Keseluruhan	Dok.	...		...		...		...	
01	2.0 5	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai										
01	2.0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Stel	87	358.785.000	87	376.724.250	87	395.560.463	87	415.338.486
01	2.0 5	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						0		0		0
01	2.0 5	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						0		0		0
01	2.0 5	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						0		0		0
01	2.0 5	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun						0		0		0
01	2.0 5	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas						0		0		0
01	2.0 5	08	Pemindahan Tugas ASN						0		0		0

01	2.0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Org	18	791.253.750	20	830.816.438	22	872.357.259	24	915.975.122
01	2.0 5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0		0		0
01	2.0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0		0		0
01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	95 %	679.090.505	95%	713.045.030	95%	748.697.281	95%	786.132.145
01	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat-Alat Listrik dan Lampu Penerangan Kantor	Jns	9	23.781.450	11	24.970.523	13	26.219.049	15	27.530.001
01	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan	Unt	8	41.211.083	11	43.271.637	14	45.435.218	17	47.706.979
01	2.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Unt	6	926.550	9	972.878	12	1.021.521	15	1.072.597
01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Org	86	205.766.400	86	216.054.720	86	226.857.456	86	238.200.329
01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dokumen yang dicetak/ digandakan	Jns	16	25.853.982	18	27.146.681	19	28.504.015	20	29.929.216
01	2.0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Langganan Koran	Edtr	4	5.856.840	4	6.149.682	4	6.457.166	4	6.780.024
01	2.0 6	07	Penyediaan Bahan/Material						0		0		0
01	2.0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0		0		0
01	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	Keg.	31	332.329.200	33	348.945.660	35	366.392.943	37	384.712.590
01	2.0 6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0		0		0
01	2.0 6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Admin/ Operator/ Sistem Informasi yang dikerjakan	OB	118	43.365.000	118	45.533.250	118	47.809.913	118	50.200.408
01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	95 %	738.937.500	95%	775.884.375	95%	814.678.594	95%	855.412.523
01	2.0 7	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
01	2.0 7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	Unt	6	705.705.000	8	740.990.250	10	778.039.763	13	816.941.751
01	2.0 7	03	Pengadaan Alat Besar						0		0		0
01	2.0 7	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						0		0		0
01	2.0 7	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Bh	18	33.232.500		34.894.125		36.638.831		38.470.773
01	2.0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0		0		0

01	2.0 7	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						0		0		0
01	2.0 7	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud						0		0		0
01	2.0 7	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0		0		0
01	2.0 7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0		0		0
01	2.0 7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0		0		0
01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	95 %	166.745.775	95%	175.083.064	95%	183.837.217	95%	193.029.078
01	2.0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Peranko yang dibeli	Lbr	103 0	5.197.500	1082	5.457.375	1136	5.730.244	1193	6.016.756
01	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Telepon, Air dan Listrik	Bln	12	49.329.000	12	51.795.450	12	54.385.223	12	57.104.484
				Pembayaran Tv Kabel dan Internet	Bln	12		12		12		12	
01	2.0 8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	Unt	26	17.388.000	28	18.257.400	30	19.170.270	32	20.128.784
01	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli	Jns	68	94.831.275	68	99.572.839	68	104.551.481	68	109.779.055
01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK	%	90 %	303.677.588	89%	318.861.467	88%	334.804.540	87%	351.544.767
01	2.0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
01	2.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajaknya	Unt	8	281.984.588	8	296.083.817	9	310.888.008	9	326.432.408
				Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan dan Service	Jns	36		38		40		42	
				Jumlah BBM									
01	2.0 9	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						0		0		0
01	2.0 9	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						0		0		0
01	2.0 9	05	Pemeliharaan Mebel						0		0		0
01	2.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0		0		0
01	2.0 9	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						0		0		0

01	2.0 9	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Website yang dikelola/ dikembangkan/ dipelihara	Web	1	21.693.000	1	22.777.650	1	23.916.533	1	25.112.359
01	2.0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0		0		0
01	2.0 9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0		0		0
01	2.0 9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0		0		0
01	2.0 9	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah						0		0		0

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan

IKU 2			Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	%	100 %	3.090.440.103	100%	3.232.091.858	100%	3.278.068.062	100%	3.324.443.077
02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan terselesaikan	%	100 %	3.090.440.103	100%	3.232.091.858	100%	3.278.068.062	100%	3.324.443.077
02	2.0 1		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan terselesaikan	%	100 %	2.660.870.903	100%	2.814.548.658	100%	2.860.524.862	100%	2.906.899.877
02	2.0 1	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kegiatan Pengawasan PKL	Ke g.	2	63.553.700	3	163.835.070	3	163.835.070	3	163.835.070
				Jumlah Kegiatan Pengamanan	Ke g.	6	156.612.800	6	156.612.800	6	156.612.800	6	156.612.800
				Jumlah Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menerima Honorarium	Org	34	1.006.200.000	34	1.006.200.000	34	1.006.200.000	34	1.006.200.000
				Jumlah Kegiatan Pengamanan Pengawasan Pejabat Pemda, Provinsi dan Pusat	Ke g.	24	238.440.000	24	238.440.000	24	238.440.000	24	238.440.000
				Jumlah Daerah Rawan Trantibum	Kec .	23	307.515.000	23	307.515.000	23	307.515.000	23	307.515.000
				Jumlah Personil Pengamanan (Pos Penjagaan, DAN Pos, Perwira Pengawas, Pamkat VIP dan PTI	Org	44	272.400.000	44	272.400.000	44	272.400.000	44	272.400.000
				Jumlah Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini	Ke g.	10	42.190.000	10	42.190.000	10	42.190.000	10	42.190.000
02	2.0 1	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	%	100 %	186.707.800	100%	189.507.800	100%	189.507.800	100%	189.507.800

02	2.0 1	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat se-Kabupaten Kapuas Hulu	Ke g	1	77.323.900	1	77.323.900	1	77.323.900	1	77.323.900
02	2.0 1	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang didata petugas Linmas	Des a	56	46.000.000	112	69.000.000	168	92.000.000	225	115.000.000
				Persentase Penanganan bencana	%	100 %	100.000.000	100%	120.000.000	100%	135.000.000	100%	150.000.000
				Jumlah Peserta Pembinaan Potensi Linmas Desa	%	6%	80.000.000	9%	130.000.000	13%	180.000.000	16%	230.000.000
02	2.0 1	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional	%	72%		74%		77%		79%	
				Jumlah Aparatur yang Mengikuti Latihan Bela Diri dan Kesamaptaaan	Org	50		50		50		50	
				Jumlah Peserta Pelatihan Dalmas	Org	50		50		50		50	
				Jumlah Anggota Satpol PP Kecamatan yang mengikuti Kegiatan Penyuluhan			151.927.703		159.524.088		167.500.292		175.875.307
				Jumlah Peserta Diklat PTI									
				Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan Dasar Satpol PP									
				Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Intelijen									
				Persentase Anggota Linmas yang mengikuti Pelatihan Linmas	%	3,14 %	30.000.000	5,65%	40.000.000	8,79%	50.000.000	13,19 %	60.000.000
02	2.0 1	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum										
02	2.0 1	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum										
02	2.0 1	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat										
02	2.0 1	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Org / Pkt	25	12.000.000	25	12.000.000	25	12.000.000	25	12.000.000
02	2.0 2		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	%	100 %	429.569.200	100%	417.543.200	100%	417.543.200	100%	417.543.200

			Kota	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti									
				Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada Keseluruhan									
02	2.0 2	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Perda Trantibum	Ke g	23	108.750.000						
				Jumlah Warga Negara yang diberikan sosialisasi	Org	0	0	200	96.724.000	200	96.724.000	200	96.724.000
02	2.0 2	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Perda yang termonitor dan terevaluasi	Ke g	6	158.846.400	10	158.846.400	10	158.846.400	10	158.846.400
02	2.0 2	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang tertangani	Kas us	15	161.972.800	10	161.972.800	10	161.972.800	10	161.972.800
02	2.0 3		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota										
02	2.0 3	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang direkrut									
				Jumlah PPNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan									

Renstra 2021-2026 disusun dengan tahapan-tahapan yaitu Ranwal Renstra, Rancangan Renstra dan Ranhir Renstra. Setelah ranhir renstra ditetapkan sebagai Renstra maka renstra tersebut tidak bisa diubah lagi. Berdasarkan kesepakatan hari ini Renstra 2021-2026 Satpol PP sudah memasuki tahap yang pertama yaitu **Ranwal Renstra**. Tahapan selanjutnya yaitu penyusunan Rancangan Renstra. Rancangan Renstra ini disusun berdasarkan RKA 5 Tahunan yang akan disusun kembali oleh bidang-bidang dan sub bagian. Oleh sebab itu diminta kembali kepada para Kepala Bidang untuk menyusun RKA dari 2022 sampai dengan RKA 2026 dengan format **RKA** yang selanjutnya RKA tersebut menjadi bahan penyusunan Rancangan Renstra 2021-2026. RKA tersebut disampaikan paling lambat Tanggal **29 Januari 2021**.

5. Identifikasi Resiko Kinerja 2021

Yang akan diidentifikasi resiko adalah sasaran utama dan 2 sub kegiatan penunjang sasaran utama. Adapun sasaran utama pada Satpol PP adalah pada sasaran IKU 2 yaitu: **Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu**. Identifikasi diuraikan sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Risiko Teridentifikasi	Pemilik Resiko	Faktor Penyebab		
					Sumber (Internal/Eksternal)	Controllable/ Uncontrollable	Uraian Penyebab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	Koordinasi antar Instansi lemah	Bid. Penegakan & Operasi	Eksternal	Controllable	Ego sektoral
			Ketaatan Masyarakat Terhadap Perda Kurang	Bid. Penegakan & Operasi	Eksternal	Controllable	Kurangnya Sosialisasi dan tingkat pemahaman masyarakat yang tidak merata.
			Tidak Adanya Tenaga PPNS	Bid. Penegakan & Operasi	Internal	Controllable	Terbatasnya Sumber Daya Manusia
			Peralatan dan Perlengkapan Operasional Belum memadai	Bid. Penegakan & Operasi	Internal	Controllable	Keterbatasan anggaran
			Jumlah Anggota Operasional Belum Memadai	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil	Internal	Controllable	Keterbatasan anggaran
			Kurangnya sosialisasi tentang Perda-Perda kepada Masyarakat	Bid. Penegakan & Operasi	Internal	Controllable	Keterbatasan anggaran
			Perda yang sudah tidak relevan dengan kehidupan Sosial Kemasyarakatan	Bid. Penegakan & Operasi	Internal	Controllable	Proses revisi perda membutuhkan waktu dan biaya
			Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kurang	Bid. Perlindungan Masyarakat	Eksternal	Controllable	Tidak ada gaji, resiko kerja tinggi, dan performa tidak menarik

			Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	Bid. Perlindungan Masyarakat	Eksternal	Controllable	Kurangnya kesadaran arti penting menjaga kondisi lingkungan yang aman dan kondusif
			Tidak adanya peralatan dan perlengkapan Linmas	Bid. Perlindungan Masyarakat	Eksternal	Controllable	Keterbatasan Anggaran
			Tingkat Minat Anggota Pol PP untuk mengikuti Tes Jabatan Fungsional tidak ada	Bidang Peningkatan Kapasitas Personil	Internal	Controllable	Peserta tidak siap untuk mengemban tugas sebagai Jafung
			Penerapan SPM Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Bidang Penegakan dan Operasi	Internal	Controllable	Identifikasi dan Penafsiran Kerugian Materi dan cidera

No	Risiko Teridentifikasi	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Level Risiko	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Koordinasi antar Instansi lemah	4	4	16	Tinggi-Dimitigasi
2	Ketaatan Masyarakat Terhadap Perda Kurang	3	5	15	Sedang
3	Tidak Adanya Tenaga PPNS	5	1	5	Sangat Rendah
4	Peralatan dan Perlengkapan Operasional Belum memadai	4	2	8	Rendah
5	Jumlah Anggota Operasional Belum Memadai	5	5	25	Sangat Tinggi-Dimitigasi
6	Kurangnya sosialisasi tentang Perda-Perda kepada Masyarakat	3	2	6	Rendah
7	Perda yang sudah tidak relevan dengan kehidupan Sosial Kemasyarakatan	5	4	20	Sangat Tinggi-Dimitigasi
8	Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kurang	3	3	9	Rendah
9	Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	4	3	12	Sedang
10	Tidak adanya peralatan dan perlengkapan Linmas	5	4	20	Sangat Tinggi-Dimitigasi
11	Tingkat Minat Anggota Pol PP untuk mengikuti Tes Jabatan Fungsional tidak ada	5	4	20	Sangat Tinggi-Dimitigasi
12	Penerapan SPM Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	3	3	9	Rendah

No	Risiko (Prioritas)	Kegiatan Pengendalian Yang Sudah ada	Kegiatan Pengendalian		Penanggung Jawab	Target Waktu
			Respon Risiko	Rencana Kegiatan Pengendalian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Koordinasi antar Instansi lemah		Mengurangi Resiko	Rapat Koordinasi Antar Instansi Pelaksana	Bid. Penegakan dan Operasi	Sepanjang Tahun
2	Ketaatan Masyarakat Terhadap Perda Kurang	Patroli Pagi, siang dan Malam	Mengurangi Resiko	Melakukan Sosialisasi	Bid. Penegakan dan Operasi	Sepanjang Tahun
				Pembinaan	Bid. Penegakan dan Operasi	Sepanjang Tahun
				Penindakan	Bid. Penegakan dan Operasi	Sepanjang Tahun
3	Tidak Adanya Tenaga PPNS	Mengusulkan tenaga PPNS dari Luar Instansi POL PP	Menerima Resiko	Menyurati BKPSDM	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil	Januari 2021
4	Peralatan dan Perlengkapan Operasional Belum memadai	Mengusulkan setiap tahun anggaran	Efisiensi Kinerja	Mengusulkan Anggaran	Bid. Penegakan dan Operasi	Sepanjang Tahun
5	Jumlah Anggota Operasional Belum Memadai	Optimalisasi pemerataan pembebanan tugas	Membagi Resiko	Penambahan Anggota	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil	Sepanjang Tahun
6	Kurangnya sosialisasi tentang Perda-Perda kepada Masyarakat	Melakukan Penyuluhan	Mengurangi Resiko	bekerjasama dengan dinas instansi terkait untuk melakukan sosialisasi	Bid. Penegakan dan Operasi	Sepanjang Tahun
7	Perda yang sudah tidak relevan dengan kehidupan Sosial Kemasyarakatan	mengusulkan revisi perda	Menerima Resiko	melakukan revisi Raperda	Bid. Penegakan dan Operasi	Triwulan IV

8	Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kurang		Mengurangi Resiko	Berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa agar membuat aturan terkait harus menganggarkan Gaji Linmas dalam Anggaran Desa	Bid. Perlindungan Masyarakat	Sepanjang Tahun
9	Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan		Mengurangi Resiko	Pelatihan dan Pembinaan Linmas Desa	Bid. Perlindungan Masyarakat dan Bid. Peningkatan Kapasitas Personil	Triwulan II dan III
10	Tidak adanya peralatan dan perlengkapan Linmas		Mengurangi Resiko	Berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa agar Desa menganggarkan Peralatan dan Perlengkapan Linmas	Bid. Perlindungan Masyarakat	Triwulan I
11	Tingkat Minat Anggota Pol PP untuk mengikuti Tes Jabatan Fungsional tidak ada		Mengurangi Resiko	Membuat surat Penryataan dan Teguran/ pembinaan bahwa seluruh PNS Satpol PP Wajib Jafung	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil	Triwulan I
12	Penerapan SPM Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada		Mengurangi Resiko	Membuat Perbub tentang Standar Pembayaran Kerugian Materi dan Cidera	Bidang Penegakan dan Operasi	Triwulan I

6. KAK

Berdasarkan Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 050/371/POL.PP/SET-A/2020 Tanggal 14 Desember 2021 Perihal Penyusunan KAK TA 2021, bahwa telah diminta untuk menyusun KAK 2021. Namun sampai dengan hari ini beberapa Seksi/ Sub Bagian yang belum menyampaikan:

- Sub Bagian Umum dan Aparatur
- Seksi Perlindungan Masyarakat
- Seksi Bina Potensi Masyarakat

7. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan dan Triwulanan

Menyampaikan Laporan secara terus menerus dan update yang akan diinputkan pada aplikasi website:

<https://satpolpp.kemendagri.go.id>:

1. Laporan Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat setiap Triwulan (Heri Kurniadi);
2. Deteksi dan Cegah dini setiap setelah melaksanakan kegiatan (Intelijen);
3. Pembinaan, Penyuluhan, Sosialisasi (Endah Triwulandari) ;
4. Laporan Patroli setiap hari (Akhmad Tabri)
5. Pengawasan setiap setelah melaksanakan kegiatan;
6. Penertiban (Intelijen);
7. Penanganan Unjuk Rasa (Intelijen);
8. Pengamanan (Helmi);
9. Laporan Jumlah Anggota Linmas jika ada perubahan (Syaiful Anwar)
10. Laporan Anggota Linmas Desa (membantu deteksi dini, penyuluhan, patroli, Pengamanan, penertiban, Pengamanan Pemilu, Membantu Penanggulangan Bencana & Kebakaran, dll) (Syaiful Anwar);
11. Analisis Kebutuhan Pol PP (Dianita, ST);
12. Data Pegawai setiap 6 bulan atau jika ada perubahan (DUK Nominatif)(Dianita, ST);

13. Sarana dan Prasarana (Saini);

Laporan SAKIP disampaikan setiap triwulan:

1. Realisasi Kinerja (Tim SAKIP);
2. Realisasi Keuangan (Kurniadi, SE);
3. Penerapan SPM (Intelijen);

Laporan tersebut disampaikan secara tertulis dan melalui media Whatsapp Grup (SAKIP & Pelaporan Polpp) dengan melampirkan **foto**.

Demikian Evaluasi Kinerja dan Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh:

Putussibau, 19 Januari 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kapuas Hulu,

Sekretaris,

WALIDAD, S.E., M.M.

NIP. 19720828 199803 1 017

RUPINUS, S.Sos., M.Si.

NIP. 19691112 199010 1 001

Kabid Perlindungan Masyarakat,

Kabid Peningkatan Kapasitas Personil,

H. AFDHAL YASIER, S.H., S.Hut., M.M.

NIP. 19730327 199903 1 006

YOSEF JASMAN, S.E.

NIP. 19660316 199703 1 002

Kabid Penegakan dan Operasi,

EDY SUHARDI, S.Sos

NIP. 19770709 200803 1 001

FOTO-FOTO RAPAT EVALUASI TRIWULAN IV TAHUN 2020





Jalan Danau Luar No. 01 - Telp. (0567) 21359 - Putussibau - Kode Pos 78711
Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id - Email: satpolpp@kapuashulukab.go.id

DAFTAR HADIR

Acara / Kegiatan : Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2020
Tempat : Ruang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kapuas Hulu
Hari / Tanggal : Selasa, 19 Januari 2021
Pukul : 13:00 WIB

Notul